

KINERJA APARATUR DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK DI DESA BATUAH, KABUPATEN TANAH BUMBU

Jaya Lesmana¹, Junaidy.,S.Sos.,M.I.Kom², Sitna Hajar Malawat, S.AP., M.AP.
¹Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uniska Banjarmasin

ABSTRAK

“KINERJA APARATUR DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK DI DESA BATUAH, KABUPATEN TANAH BUMBU”

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Desa sebagai ujung tombak dalam pelayanan publik yang ada di Desa Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu dan apa saja faktor penghambat kinerja Aparatur Desa Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara mendalam dengan 6 (enam) orang informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja Aparatur Desa Batuah Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Publik dilihat dari segi pemahaman atas tupoksi, kualitas, kuantitas kinerja, dan komitmen kerja sudah cukup baik, namun mengenai ketepatan waktu, Aparatur Desa Batuah masih belum disiplin. Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Aparatur Desa Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu ada tiga yaitu kurangnya sarana dan prasarana desa, terbatasnya kemampuan aparatur desa, dan rendahnya pendidikan masyarakat desa yang ada di Desa Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu.

Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Desa, Pelayanan, Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju,

- Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*. Bandung. Pustaka Reka Cipta
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Hidayat, Dayat. 2010. *E-government: Hubungan Teknologi Informasi Dengan Administrasi Publik*. Bandung: Universitas Padjajaran
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mukarom dkk, 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka
- Nazir, Moh. 2018. *Metode Penelitian Sosial*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Raymond, dkk. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Mencapai Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat
- Rizky A.2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Gramedia
- Setia Mukarom, dkk 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Setyorini, Ketty,Zulaikha, dkk. 2015. *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa*. Jawa Timur: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: BumiAksara.
- Suwanda, Dadang. Dan Agus Purwoko. 2013. *Menyusun Standar Operating Procedures Lembaga Pemerintah*. Jakarta. PPM

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik